

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan lain di kawasan perkotaan atau pedesaan (Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan). Permukiman akan terus mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap waktunya. Menurut Ruhimat Mamat (2016) hal ini jelas akan menjadi masalah ketika tidak ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan penunjang kehidupan lainnya, yang nantinya akan memunculkan permasalahan permukiman. Salah satu permasalahan permukiman ialah munculnya Permukiman kumuh. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh merupakan kawasan yang terdiri dari rumah-rumah yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Masalah permukiman kumuh di Indonesia masalah yang sering muncul di seluruh wilayah baik itu kota maupun kabupaten disebabkan oleh berbagai hal seperti urbanisasi dan pertumbuhan penduduk (Doxiadis, 1968). Urbanisasi yang terjadi disebabkan karena faktor kurangnya lapangan kerja yang ada di desa, dengan bekerja di kota diharapkan mampu memiliki penghasilan yang tinggi. Namun kenyataannya masih banyak kaum migran (masyarakat yang melakukan urbanisasi) yang bekerja ke kota namun tidak terampil dan pendidikan rendah, dengan keadaan tersebut memaksa kaum migran menerima keadaan dengan bertempat tinggal di pinggiran kota yang tidak layak huni.

Masalah munculnya permukiman kumuh tak hanya dialami oleh kota-kota besar saja, Kabupaten Jepara juga mengalami masalah yang sama terhadap

persoalan permukiman kumuh. Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan langkah untuk mengatasi dan mengantisipasinya dengan menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut diharapkan dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta untuk menjaga serta meningkatkan kualitas dan fungsi permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki persoalan terhadap masalah permukiman kumuh yang cukup merata di hampir seluruh wilayah, beberapa permukiman kumuh tersebut dikelompokkan menjadi sebuah Kawasan Permukiman Kumuh dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2020. Terdapat 9 kawasan permukiman kumuh dan rawan kumuh, yaitu Kawasan Bulu, Kawasan Potroyudan, Kawasan Pecangaan, Kawasan Karimunjawa, Kawasan Mayong Lor, Kawasan Bangsri Kedungleper, Kawasan Wedelan, Kawasan Pringtulis, dan Kawasan Kancilan – Kelet - Tulakan. Untuk memperjelas data tersebut, bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi Kumuh dan Rawan Kumuh Kabupaten Jepara

No	Kawasan	Desa	Luas Permukiman kumuh (Ha)	Klasifikasi
1	Kawasan Karimunjawa	Karimunjawa	4,32	Kumuh
2	Kawasan Mayong Lor	Mayong Lor	18,71	Kumuh
3	Kawasan Bangsri - Kedungleper	Bangsri	5,18	Kumuh
		Kedungleper	3,42	Kumuh
4	Kawasan Wedelan	Wedelan	3,35	Rawan Kumuh

Lanjutan tabel 1.2

No	Kawasan	Desa	Luas Permukiman kumuh (Ha)	Klasifikasi
5	Kawasan Pringtulis	Pringtulis	4,56	Rawan Kumuh
6	Kawasan Kancilan – Kelet - Tulakan	Kancilan	3,28	Rawan Kumuh
		Kelet	0,98	Rawan Kumuh
		Tulakan	3,22	Rawan Kumuh
7	Kawasan Bulu	Bulu	5,25	Kumuh
		Demaan	17,42	Kumuh
		Jobokuto	9,13	Kumuh
		Karang kebagusan	1,22	Kumuh
		Kauman	1,58	Kumuh
		Ujungbatu	9,77	Kumuh
8	Kawasan Potroyudan	Pengkol	8,21	Kumuh
		Potroyudan	11,84	Kumuh
		Saripan	4,61	Kumuh
9	Kawasan Pecangaan	Lebuawu	0,72	Kumuh
		Pecangaan Kulon	5,46	Kumuh
		Pecangaan Wetan	11,13	Kumuh

Sumber: Dokumen RP2KPKP 2019 dan Hasil Pengolahan 2020

Jika melihat dari Tabel 1.1 di atas, terdapat dua klasifikasi yaitu kumuh dan rawan kumuh. Kawasan yang masuk ke klasifikasi Kumuh yaitu Kawasan Bulu, Kawasan Potroyudan, Kawasan Pecangaan, Kawasan Karimunjava, Kawasan Mayong Lor, dan Kawasan Bangsri Kedungleper. Sedangkan kawasan

yang masuk dalam kawasan rawan kumuh antara lain Kawasan Wedelan, Kawasan Pringtulis, dan Kawasan Kancilan-Kelet-Tulakan. Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat pada Kecamatan Jepara memiliki permukiman kumuh terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu 9 desa dan semuanya masuk ke daerah kumuh, hal tersebut menunjukkan jika permukiman kumuh cenderung berada pada pusat ekonomi dan bisnis yaitu pada Kecamatan Jepara yang merupakan Ibukota Kabupaten Jepara. Selain jumlah desa yang paling banyak, luas Kawasan Bulu merupakan yang terluas dibanding Kawasan lain, yaitu total wilayah Kawasan Bulu adalah 44,37 ha, sedangkan Kawasan terluas selanjutnya adalah Kawasan Potroyudan dengan 24,66 ha, dan luas Kawasan tersempit adalah Kawasan Karimunjawa dengan luas hanya 4,32 ha.

Dengan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Kawasan Bulu karena pada Kawasan Bulu memiliki desa yang masuk kategori Kumuh terbanyak dengan 6 desa. Alasan lain adalah karakteristik Kawasan Bulu yang berbeda dari Kawasan kumuh lain yaitu terletak di ibu kota daerah dan berada di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik yang berbeda dari Kawasan lainnya.

Pemilihan Kawasan Bulu semakin diperkuat dengan penjelasan tentang Kawasan kumuh pesisir menurut Muvidayanti Salma (2019) yang meneliti tentang permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, menurutnya Kawasan kumuh pesisir merupakan imbas dari permintaan akan lahan permukiman yang semakin meningkat, sementara luas lahan di pusat kota secara administratif tetap, yang pada akhirnya memaksa pendatang untuk bermukim di Kawasan pinggiran, yang salah satunya Kawasan Bulu yang merupakan kawasan kumuh kota yang berada di pesisir. Fakta tersebut diperjelas dengan pernyataan Istikasari May dan Khadiyanto Parfi (2014) yaitu penduduk cenderung padat di daerah pusat ibukota salah satu penyebabnya adalah karena faktor lokasi yang dekat dengan pusat ekonomi. Sedangkan karakteristik yang merupakan wilayah pesisir juga dijelaskan Budihardjo (1997) yang berpendapat jika Keberadaan permukiman pesisir sangat menarik karena berkaitan erat

dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, dimana pantai ini harus mudah diakses oleh publik dengan sistem transportasi dan jaringan jalan yang baik, diperkaya dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang beragam.

Kawasan Bulu adalah sebuah kawasan yang terdiri sejumlah desa, dengan hanya beberapa RT (Rukun Tetangga). Desa yang masuk kategori Kawasan Kumuh, dengan yang terletak di Kecamatan Jepara yang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Jepara dimana kantor Pemerintahan beserta dinas-dinas lainnya berlokasi. Pusat ekonomi dan bisnis juga berlokasi di Kecamatan Jepara dengan perkembangan yang pesat sebagai pusat perdagangan dan jasa. Dalam Kecamatan Jepara Dalam Angka 2019, lokasi yang menjadi pusat ekonomi yaitu terdapat Pelabuhan Kartini berlokasi di Desa Bulu yang berfungsi untuk penyeberangan penumpang dan barang, lalu ada Pelabuhan Jepara yang berlokasi di Desa Jobokuto yang sekaligus sebagai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) terbesar di Kabupaten Jepara, dan adanya 2 Pasar tradisional yang terdapat di desa Jobokuto. Dari penjelasan tadi dapat dilihat bahwa hampir semua pusat kegiatan ekonomi terdapat pada Kawasan Bulu. Hal tersebut dapat menunjukkan jika permukiman kumuh cenderung berada pada sekitaran pusat ekonomi.

Kecenderungan masyarakat yang bermukim di sekitar pusat kota/ekonomi ini dapat diketahui dengan kepadatan penduduk yang berada di Kawasan tersebut. Menurut PUSLITBANG Permukiman 2011 Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan ada beberapa tingkatan kepadatan penduduk, yaitu Kepadatan penduduk Rendah <150 jiwa/ha, Sedang 151-200 jiwa/ha, Tinggi 201-400 jiwa/ha, dan Sangat Padat >400 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk Kawasan Bulu

No	Desa	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha ²)
		(ha)	(km ²)		
1	Bulu	5,25	0,0525	1037	197
2	Demaan	17,42	0,1742	1676	96
3	Jobokuto	9,13	0,0913	2633	288
4	Karangkebagusan	1,22	0,0122	192	157
5	Kauman	1,58	0,0158	319	201
6	Ujungbatu	9,77	0,0977	2503	256
Jumlah		44,37	0,4437	8360	188

Sumber: Hasil Pengolahan 2020

Menurut tabel 1.2 diatas dapat diketahui luas total Kawasan Bulu adalah 44,37 ha. atau 0,4437 km² dengan wilayah terluas terdapat pada desa Demaan dan tersempit pada Desa Karangkebagusan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Desa Jobokuto dengan 288 jiwa/ha dan terendah pada Desa Demaan dengan kepadatan 98 jiwa/ha. Terdapat 3 desa yang masuk kategori kepadatan tinggi yaitu Desa Jobokuto, Desa Ujungbatu, dan Desa Kauman. Terdapat 2 desa yang masuk kategori kepadatan sedang yaitu Desa Karangkebagusan dan Desa Bulu. Sedangkan Desa Demaan masuk kategori kepadatan rendah.

Perkembangan pembangunan pada permukiman di lahan yang terbatas di pusat kota dapat menimbulkan masalah konversi lahan atau perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsi awal (Riezky Syafitri, 2017). Keadaan inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan, dimana untuk harga jual atau sewa rumah di daerah kota tergolong mahal, sedangkan lahan kosong di kota sudah tidak ada. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi kekumuhan permukiman di daerah penelitian bisa dilihat pada Gambar 1 dan 2 di bawah ini:



Gambar 1.1 Contoh Rumah Di Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bulu

Sumber : Survey lapangan 2020



Gambar 1.2 Contoh Permasalahan Permukiman Kumuh Di Desa Ujungbatu

Sumber : Survey lapangan 2020

Permasalahan permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi daya tarik untuk kegiatan penelitian ini dikarenakan mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara maritim dan banyak kawasan di Negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut. Menurut Erga Pradika (2014) dalam jurnal nya berpendapat bahwa Permukiman kumuh di kawasan pesisir akan terus berkembang dan ada apabila tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir seperti nelayan masih rendah sehingga mereka masih belum cukup mampu untuk memperbaharui kondisi tempat tinggal

Berdasarkan penjabaran permasalahan mengenai permukiman kumuh di Kawasan Bulu, maka dilakukan penelitian guna mengetahui tingkat kekumuhan serta karakteristik penduduk di permukiman kumuh di Kawasan Bulu, dengan

tujuan mengetahui aspek yang mendasari tingkatan permukiman kumuh di wilayah tersebut, dengan menganalisis aspek-aspeknya seperti aspek Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum/Bersih, Kondisi Drainase, Kondisi pengelolaan limbah, Kondisi persampahan, Kondisi proteksi kebakaran, Legalitas Tanah, dan Kependudukan (PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018).

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan pemetaan, teknologi Penginderaan Jauh (PJ) yang memanfaatkan citra dengan resolusi tinggi yaitu *Quickbird* yang cocok untuk melakukan penelitian tentang permukiman kumuh (Riezky Syafitri, 2017). Kemajuan teknologi ini dapat membantu dalam mengetahui bagaimana tingkatan permukiman kumuh yang ada pada daerah penelitian tanpa perlu melakukan survey secara langsung ke lapangan. Melalui penginderaan jauh ini diharapkan akan mempermudah dalam pengolahan data khususnya parameter-parameter yang dapat disadap melalui citra. Hasil dari Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan memanfaatkan metode *overlay* atau tumpang susun peta. Metode tersebut digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi bagaimana tingkat kekumuhan pada Kawasan permukiman kumuh Bulu yang hasil pengolahannya akan berupa peta tematik, metode yang sama juga dapat digunakan untuk mengetahui hubungan spasial antara tingkat kekumuhan dengan karakteristik penduduk yang ada pada daerah penelitian.

Berdasarkan permasalahan di daerah penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Permukiman Kumuh di Kawasan Bulu Kabupaten Jepara”** untuk menganalisis tingkatan permukiman kumuh, karakteristik penduduk, dan hubungan spasial antara tingkatan kumuh dengan karakteristik penduduk di Kawasan Bulu, Kabupaten Jepara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat permukiman kumuh di Kawasan Bulu?
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kawasan Bulu?
3. Bagaimana hubungan spasial antara tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik penduduk di Kawasan Bulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat permukiman kumuh di Kawasan Bulu
2. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kawasan Bulu
3. Menganalisis hubungan spasial antara tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik penduduk di Kawasan Bulu

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu syarat menempuh S1 dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang geografi khususnya tentang permukiman kumuh.

2. Manfaat Umum

Dapat menjadi informasi tambahan kepada masyarakat umum mengenai informasi yang secara lebih rinci tentang permukiman kumuh di Kawasan Bulu, Kabupaten Jepara

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Permukiman

Menurut UU No. 4 Tahun 1992, dijelaskan bahwa permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berada di luar dari kawasan lindung, baik kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan. Di dalam permukiman terdapat kawasan perumahan dan sarana prasarana yang disediakan guna menunjang kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman. Berbeda dengan perumahan, permukiman bukan hanya tentang rumah secara fisik saja, tetapi sekumpulan perumahan dan lingkungan yang ada di dalamnya serta menitik beratkan pada perilaku dan sikap yang ada di dalam sebuah permukiman. Dalam UU No. 4 tahun 1992 juga disebutkan bahwa permukiman yang baik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat lebih dari satu perumahan dalam sebuah Permukiman
2. Sebagian besar adalah untuk rumah hunian.
3. Fasilitas yang ada lebih kepada pelayanan skala lingkungan.
4. Memiliki Luas kawasan yang kurang dari 1000 Ha.

Sedangkan Koestoer (2001) menjelaskan bahwa permukiman dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu

1. Permukiman teratur, adalah sebuah permukiman yang dibangun dengan perencanaan dan dilengkapi fasilitas yang baik
2. Permukiman tidak teratur, adalah permukiman yang dibangun tanpa melalui perencanaan terlebih dahulu dan memiliki fasilitas yang kurang baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebuah permukiman dapat diklasifikasikan dan diidentifikasi bagaimana kualitasnya dengan

mengetahui pola keteraturannya, baik itu permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan.

1.5.1.2 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 jiwa/ha), tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dijelaskan juga pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa permukiman dapat dikatakan kumuh jika mengalami beberapa hal, yaitu:

1. Adanya ketidakaturan dan kepadatan bangunan yang tinggi
2. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, serta utilitas umum di permukiman
3. Terjadi penurunan kualitas rumah atau permukiman, dan prasarana, sarana serta utilitas umum
4. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa digambarkan jika lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang memiliki kondisi tempat tinggal berdesakan cenderung sempit, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuninya, bangunan bersifat sementara, prasarana dan fasilitas sosial kurang (puskesmas, tempat ibadah, sekolah), menempati tanah tidak resmi, pendidikan rendah, kualitas bangunan tidak layak, rawan bencana (kebakaran) dan rawan timbulnya penyakit.

Menurut Budiharjo (1997) menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah lingkungan yang memiliki kualitas yang sangat tidak layak untuk dijadikan hunian, memiliki ciri-ciri yaitu berada di lahan yang tidak sesuai dengan fungsi awalnya, memiliki kepadatan rumah yang tinggi namun dengan luas wilayah yang sempit, kualitas bangunan

yang rendah, rawan akan penyakit sosial maupun lingkungan, sarana dan prasarana yang kurang memadai yang seringkali membahayakan bagi penduduk di permukiman.

Sedangkan menurut World Bank (1999) dalam Auliannisa. D (2009), Lingkungan permukiman kumuh dijabarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan sekitarnya yaitu lingkungan perkotaan, dimana kondisi kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi lingkungan permukiman yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

1.5.1.3 Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir menurut UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi satu sama lain. Wilayah pesisir merupakan daerah dimana antara darat dan laut saling bertemu, salah satu pemanfaatan wilayah pesisir yaitu mendirikan rumah oleh masyarakat di sana, yang pada umumnya terdiri dari nelayan.

Menurut penjelasan Suprihayono (2007) dalam Damisi, D. M., dkk (2014) permukiman pesisir merupakan lingkungan permukiman yang berada di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan, yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang menjadi mata pencaharian penduduk kawasan pesisir bertujuan dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan.

Lingkungan permukiman di wilayah pesisir biasanya merupakan Kawasan permukiman kumuh dan tingkat pelayanannya sangat terbatas akan pemenuhan kebutuhan, prasarana dan sarana lingkungan dasar yang kurang, terutama dalam akses air bersih, sarana

drainase dan sanitasi, serta prasarana dan sarana yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang kurang memadai. (Amir Mahmud, 2007).

Secara fisiografis, permukiman pesisir menurut Ritohardoyo dalam Kadir, dkk. (2020) adalah permukiman yang akan menyesuaikan dengan bentukan tepi pantai. Seperti di Kawasan permukiman kumuh Kecamatan Jepara, bentuk rumah yang ada di sana mengikuti bentukan dari tepi pantainya. Sektor transportasi laut juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir, seperti adanya Pelabuhan guna untuk transportasi laut dan akses perdagangan. Nelayan di pesisir membuat sebuah permukiman bertujuan agar lebih dekat dengan laut, dimana para nelayan memanfaatkan laut untuk mencari nafkah dengan menangkap ikan, budidaya karamba, dan lain sebagainya

1.5.1.4 Masyarakat Yang Tinggal Di Permukiman Kumuh

Masalah permukiman pada umumnya muncul dengan sendirinya, salah satunya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduknya sendiri yang semakin bertambah banyak seiring dengan perkembangan suatu wilayah. Parsudi Suparlan (1984) mengatakan bahwa ciri-ciri masyarakat permukiman yang kumuh adalah dihuni oleh penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai untuk masyarakat.

Lebih lanjut lagi Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa pekerja sektor informal adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus, umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki penghasilan tetap, dan jam kerja tidak teratur dan ini umumnya adalah para pendatang dari desa yang melakukan urbanisasi, hal itu dilakukan karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa, kemudian mereka mencari tempat tinggal yang seadanya di dekat sungai, rel kereta, atau pantai.

Menurut Bintarto dalam Surtiani (2006) penyebab tingginya arus urbanisasi di Indonesia tergantung dari beberapa faktor :

- a. Tingkat pendidikan penduduk
- b. Tingkat kesehatan masyarakat
- c. Presentase penduduk miskin
- d. Latar belakang pertanian di daerah pedesaan
- e. Kondisi geografis
- f. Fungsi serta peranan kota Migrasi

Lebih lanjut lagi Bintarto menjelaskan jika perkembangan penduduk yang pesat itu pada akhirnya mengakibatkan kebutuhan akan lahan dan rumah semakin tinggi yang pada akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, lalu sedikit demi sedikit permukiman kumuh pun terbentuk. Masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada di bawah standar kenyamanan, seperti rendahnya mutu pelayanan air minum/bersih, kurangnya air bersih, masalah limbah, drainase, sampah serta masalah-masalah lainnya.

1.5.1.5 Penginderaan Jauh

Lillesand dalam Danoedoro (2012) menjelaskan pengertian penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni guna memperoleh informasi tentang suatu objek, area, serta gejala melalui analisis menggunakan kaidah ilmiah, dan data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, atau gejala yang sedang dikaji. Penginderaan jauh bertujuan untuk memperoleh data seperti sumber daya alam serta lingkungannya, dan informasi tentang objek yang ada di muka bumi.

Dewi Ilandayani dan Agung Setiyadi (2003) juga mengungkapkan bahwa Penginderaan Jauh adalah kumpulan berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh informasi tentang bumi.

Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi, dengan proses akhir yaitu analisis data guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada penginderaan jauh, proses pengumpulan data dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan alat pengindera atau sensor, umumnya sensor ini dipasang pada wahana (platform) seperti *drone*, pesawat terbang, satelit, pesawat ulang-alik, dll. Sensor sendiri merupakan alat penginderaan jauh yang memiliki bagian atau komponen seperti kamera, penyiam (scanner), dan radiometer yang dilengkapi detektor.

Citra resolusi tinggi pada penginderaan jauh menurut Yang (2011) memiliki kelebihan dalam mengkaji masalah perkotaan salah satunya adalah kemampuan dalam menyadap informasi secara detail karena resolusi spasialnya tinggi, sehingga memudahkan dalam interpretasi citra salah satunya dalam mengidentifikasi permukiman kumuh dalam penelitian ini.

Interpretasi visual menurut Susanto (1991) adalah penafsiran unsur-unsur pengenalan pada objek atau gejala yang terekam pada citra. Unsur-unsur pengenalan ini secara individual maupun secara kolektif mampu membimbing penafsir ke arah pengenalan yang benar. Unsur-unsur interpretasi: rona, bentuk, bayangan, ukuran, pola, tekstur, situs dan asosiasi. Pemanfaatan interpretasi visual dalam penelitian ini adalah dalam proses melakukan identifikasi parameter yang dapat dilakukan dengan menggunakan citra, yang selanjutnya dilakukan pengamatan langsung objek di lapangan agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan tepat.

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis

Eddy Prahasta (2000) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah sistem yang terdiri atas *software*, *hardware*, data dan pengguna yang digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan semua fenomena yang ada di muka bumi. Data-data yang berupa detail fakta, kondisi dan informasi disimpan dalam suatu basis data dan nantinya akan digunakan untuk berbagai jenis keperluan penelitian seperti analisis, manipulasi, penyajian dan sebagainya.

Menurut Fauzan Masykur (2014) Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer, dipakai untuk memproses data yang bersifat spasial dan ber-georeferensi. Secara umum SIG memiliki 5 Komponen yang bekerja sebagai satu kesatuan, yaitu: data, software, hardware, user dan aplikasi.

1. Data

Dalam SIG, data memiliki dua model geografis yaitu model data vektor dan model data raster.

2. Software

Sebuah software SIG haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis dan menampilkan informasi geografis. Salah satu software SIG adalah Quantum GIS (QGIS) yang merupakan software Open Source atau gratis yang dikembangkan oleh *Open Source* Geospatial Foundation (OSGeo).

3. Hardware

Dalam menjalankan software SIG, diperlukan hardware yang memiliki spesifikasi tinggi, karena untuk mengolah data-data memerlukan prosesor yang kuat, RAM yang tinggi serta Memori (Hard disk) yang besar, dan kartu grafis (VGA) yang tinggi guna menyimpan hasil dari data SIG dari olah data raster maupun vektor.

4. User

Pengguna SIG atau User SIG memerlukan keahlian khusus untuk dapat mengoperasikan dan akhirnya menghasilkan sebuah data dari SIG tersebut. Pemakai SIG juga memiliki tingkatan tertentu, seperti dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada user biasa yang memanfaatkan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari saja.

5. Aplikasi

Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Data yang diolah dari SIG terdiri dari data spasial, sistem ini merealisasikan data spasial (lokasi geografis) dengan data non spasial. SIG memiliki empat fungsi utama 4M, yaitu Mapping (pemetaan), Monitoring (Pemantauan), Measurement (pengukuran), Modelling (Pemodelan).

Pada penelitian ini memanfaatkan fungsi-fungsi monitoring atau pemantauan, fungsi ini adalah menggunakan data geospasial yang bersifat multitemporal untuk melihat perubahan pada suatu bidang yaitu permukiman kumuh. fungsi lain adalah pemodelan yaitu overlay peta guna mengetahui hubungan antara tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik sosial ekonomi penduduk sehingga memunculkan informasi baru.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Augi Sekatia (2015) menuliskan penelitian dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Kajian Permukiman Kumuh Dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat)” dengan tujuan mengkaji permasalahan permukiman di Desa Tambak Lorok serta mengkaji partisipasi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di Desa Tambak Lorok. Augi Sekatia Metode deskriptif kualitatif, dengan Survey, dan Studi literatur. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang permukiman kumuh pesisir, lalu memiliki perbedaan dalam metode yang diambil dan tujuan yang berbeda

Riezky Syafitri (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi” dengan tujuan yaitu mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh dan menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. Hasil pada penelitian ini berupa peta persebaran kualitas permukiman kumuh yang dibagi menjadi 4 kelas yaitu kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, dan tidak kumuh. Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian sumber parameter yang dianut, serta lokasi yang diambil.

Salma Muvidayanti (2019), melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang” tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi rumah – rumah serta mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Tanjung Mas, dan menganalisis penyebab permukiman kumuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah interpretasi citra dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah data yang menunjukkan bahwa total luas permukiman kumuh di Tanjung Mas seluas 37,63 Ha. Hasil lainnya adalah berupa peta mengenai tingkat kekumuhan permukiman yang dibagi menjadi 4 kelas yaitu tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Kesamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis dan melakukan skoring pada masing-masing

variabel yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah terdapat lokasi penelitian.

Yesi Pratiwi (2020) menulis sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Industri Garmen Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.” Dengan tujuan mengkaji karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap perkembangan pabrik garmen di Kecamatan Pecangaan, dan dampak sosial ekonomi dari perkembangan pabrik garmen terhadap masyarakat di Kecamatan Pecangaan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan kuesioner. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu metode survey dan kuesioner, serta memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitian yang diambil, penelitian Yesi Pratiwi berfokus ke sosial ekonomi masyarakat di sekitar pabrik, sedangkan penelitian ini berfokus ke masyarakat yang menempati permukiman kumuh pesisir.

Untuk mengetahui lebih jelas penelitian saya dan penelitian sebelumnya dapat dilihat Pada Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Augi Sekatia (2015) Jurnal	Kajian Permukiman Kumuh Dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat)	• Mengkaji permasalahan permukiman di Desa Tambak Lorok • Mengkaji partisipasi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di Desa Tambak Lorok.	Metode deskriptif kualitatif, dengan Survey, dan Studi literatur.	1. Pokok dari permasalahan yaitu dari segi ekonomi sehingga masih membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat baik walaupun terbentur dari dana dan masih menunggu bantuan, partisipasi yang kurang adalah dalam pengolahan sampah. 2. Ada uluran tangan dari Pemerintah Kota Semarang maupun pihak swasta, namun dalam membangun mereka masih berpartisipasi secara langsung 3. Mereka membangun dengan gotong-royong. Dengan gotong royong akan memudahkan dan juga menekan pengeluaran sehingga masyarakat dapat menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari. Warga Tambak Lorok juga selalu bahu membahu untuk memperbaiki jalan maupun rumah yang rusak karena genangan rob.

Lanjutan Tabel 1.3

No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
2	Riezky Syafitri (2017) Skripsi	“Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi”	• Mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. • Menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat.	Metode penelitian survei dengan menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif.	1. Peta dengan data persebaran kualitas permukiman kumuh yang dibagi menjadi 4 kelas yaitu: Kumuh berat (0.53%), Kumuh sedang (17.14%), Kumuh ringan (12.94%), dan Tidak kumuh (69.39%). 2. Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terbanyak adalah Kelurahan Kranji dan Kelurahan Bintara. 3. Faktor paling mempengaruhi adalah kesesuaian dengan tata ruang yang tidak sesuai, kondisi jalan dan lingkungan yang buruk, ruang kosong antar bangunan yang terbatas, kepadatan bangunan yang tinggi, bangunan <i>non-permanen</i>, potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya dukung masyarakat yang rendah.

Lanjutan Tabel 1.3

No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
3	Salma Muvidayanti (2019) Skripsi	“Karakteristik Dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang”	• Mengidentifikasi rumah kriteria kumuh Kelurahan Tanjung Mas • Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Tanjung Mas • Menganalisis penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.	Metode penelitian kuantitatif dengan perhitungan melalui skoring.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Total luas permukiman kumuh di Tanjung Mas seluas 37,63 Ha. 2. Tingkat kekumuhan permukiman dibagi menjadi 4 kelas yaitu tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. 3. Luas permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas paling dominan yaitu kumuh sedang. 4. Faktor utama kekumuhan di lokasi penelitian yaitu ketersediaan sarana dan prasarana permukiman terutama pada pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran masih minim

Lanjutan Tabel 1.3

No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
4.	Yesi Pratiwi (2020) Skripsi	Analisis Dampak Industri Garmen Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.	Mengkaji karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap perkembangan pabrik garmen di Kecamatan Pecangaan, dan dampak sosial ekonomi dari perkembangan pabrik garmen terhadap masyarakat di Kecamatan Pecangaan	Metode survei dan kuesioner	Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Gemulung dan Pulodarat memiliki kondisi yang baik terutama setelah berdirinya pabrik garmen. Kondisi sosial dan ekonomi sebelum dan sesudah berdirinya pabrik dapat dilihat dari adanya perubahan pekerjaan dan pendapatan dari masyarakat. Dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat berupa adanya lowongan pekerjaan dan terbukanya lapangan usaha baru, untuk dampak negatif berupa pencemaran limbah yang menimbulkan bau serta pencemaran udara. Dan dampak positif terhadap kondisi ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya berupa tingginya harga lahan.

Lanjutan Tabel 1.3

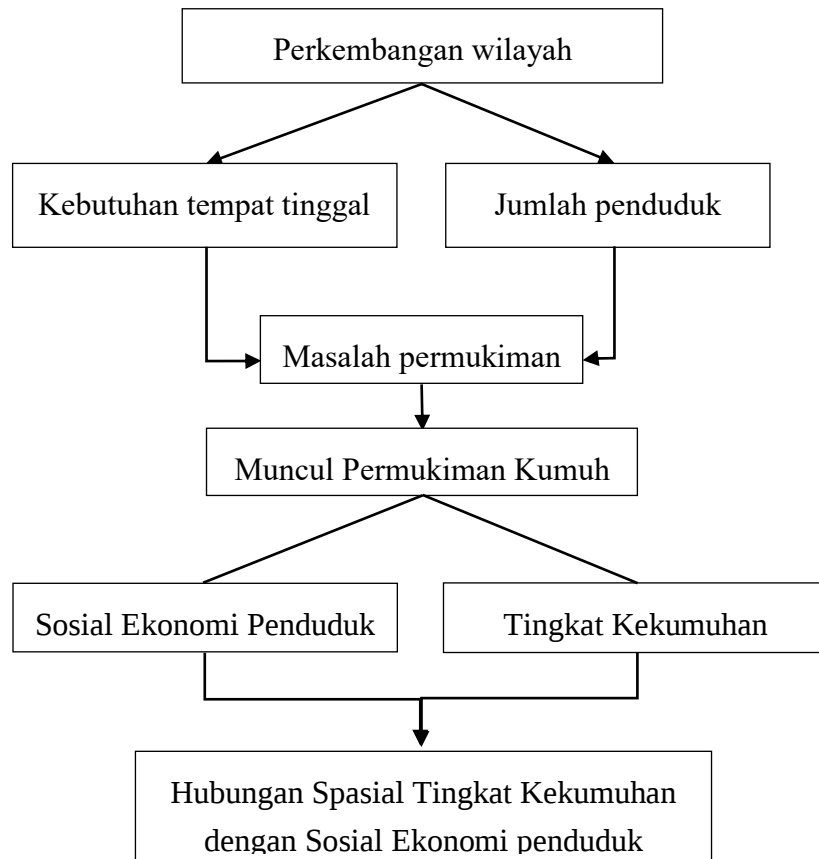
No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
5.	Azzam Ahmad Haykal (2020) Skripsi	“Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Di Kawasan Bulu Kabupaten Jepara”	• Menganalisis tingkatan Permukiman kumuh di Kawasan Bulu • Menganalisis karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kawasan Bulu • Menganalisis hubungan spasial antara tingkat kekumuhan dengan karakteristik penduduk di Kawasan Bulu	Overlay, skoring, dan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Terdapat 27 blok permukiman dengan 3 tingkat kelas kumuh, pada tingkat permukiman kumuh rendah terdapat 13 blok permukiman (48%), pada permukiman kumuh sedang terdapat 14 blok permukiman (52%), sedangkan tidak ada blok permukiman yang masuk kedalam kelas kumuh tinggi (0%). 2. Karakteristik penduduk sebagian besar (47,9%) memiliki anak berjumlah 3-5 orang dengan mayoritas (73%) memiliki tanggungan keluarga 0-3 orang setiap keluarga, sebagian besar (40%) penduduk berpendidikan sampai SMA dan mayoritas (61%) bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan diatas Rp. 1.000.000 (51%). 3. Hubungan tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik penduduk ialah pada permukiman kumuh rendah jumlah anak dan tanggungan keluarga lebih sedikit dibandingkan penduduk permukiman kumuh

Lanjutan Tabel 1.3

No.	Nama peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					sedang, pendidikan penduduk permukiman kumuh rendah lebih baik dibanding permukiman kumuh sedang, pekerjaan penduduk di permukiman kumuh rendah dan sedang sama-sama didominasi nelayan namun dalam segi pendapatan permukiman kumuh rendah lebih baik dibandingkan permukiman kumuh sedang.

Sumber : Penulis, 2020

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3. Diagram Alir Kerangka Pikir

Sumber : Penulis, 2020

Berdasarkan Kerangka pikir pada tabel 1.3 diatas, penelitian ini diawali dengan munculnya masalah tentang suatu wilayah terus mengalami perkembangan setiap waktunya, yang tak terkecuali permukiman penduduk (Ruhimat Mamat, 2016). Seiring berkembangnya sebuah wilayah maka akan menarik pendatang untuk tinggal dan menetap di wilayah tersebut namun lahan untuk tempat tinggal semakin sedikit. Hal ini jelas akan menjadi masalah yaitu munculnya Permukiman kumuh.

Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi mengenai Tingkat permukiman kumuh dengan beberapa karakteristik diantaranya adalah

kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum/bersih, kondisi drainase, kondisi pengelolaan limbah, kondisi persampahan, kondisi proteksi kebakaran, legalitas tanah, dan kependudukan. Metode skoring pada setiap parameter, kemudian dapat diidentifikasi kawasan permukiman kumuh sehingga dapat dilakukan analisis mengenai tingkat kekumuhan permukiman. Sedangkan pada karakteristik sosial ekonomi masyarakat diidentifikasi dengan beberapa karakteristik yaitu jumlah anak, jumlah tanggungan keluarga, Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kawasan Bulu. Metode yang digunakan dalam mendapatkan hasil akhir penelitian yaitu peta hubungan spasial tingkat kekumuhan dengan sosial ekonomi penduduk adalah dengan metode yaitu metode overlay atau tumpang susun peta dengan menggabungkan peta tingkat kekumuhan dan peta karakteristik sosial ekonomi penduduk.

Peneliti memiliki asumsi jika nantinya terjadi persamaan tentang tingkatan permukiman kumuh, tetapi berbeda pada karakteristik sosial ekonominya, hal tersebut dapat digali menjadi suatu analisis yang dapat menjawab tujuan penelitian ini.

1.7 Batasan Operasional

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berada di luar dari kawasan lindung, baik kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan. (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

(Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi satu sama lain. Wilayah pesisir merupakan daerah dimana antara darat dan laut saling bertemu, salah satu pemanfaatan wilayah pesisir yaitu mendirikan rumah oleh masyarakat di sana, yang pada umumnya terdiri dari nelayan. (Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Masyarakat Permukiman Kumuh adalah masyarakat yang mempunyai karakteristik antara lain permukiman yang dihuni oleh penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai untuk masyarakat. (Parsudi Suparlan, 1984)

Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni guna memperoleh informasi tentang suatu objek, area, serta gejala melalui analisis menggunakan kaidah ilmiah, dan data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, atau gejala yang sedang dikaji. (Lillesand dalam Danoedoro, 2012)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem yang terdiri atas *software*, *hardware*, data dan pengguna yang digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan semua fenomena yang ada di muka bumi. (Eddy Prahasta, 2000)